

DAFTAR PUSTAKA

- Adhihernawan, M. Y., & Fadhila, A. N. 2022. *Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum, 7(1).
- Ambarwati, D. L. 2021. *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*.
- Arafit. (2025, January 4). *Hasil Wawancara dengan Tersangka*.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Bazemore, G., & Schiff, M. 2005. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice : Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (p. 45). Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 846). Jakarta: Al-Huda.
- Dignan, J. 2005. *Understanding Victims and Restorative Justice* .
- Djazuli, H. A. 2003. *Fiqh Jinayyah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (p. 47). Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (p. 130). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (p. 20). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, R. 2013. *Kewenangan Kepolisian Menurut KUHP dalam Perspektif HAM*. Makalah Semiloka: KUHP dan Menuju Fair Trial "Victim Protection", Yogyakarta: LBH Yogyakarta.
- Ibnu Umar Islamic School. (n.d.). *Tafsir Al-Muyasar Surat At-Taubah 71-80*. Retrieved from <https://www.iuamarschool.com>.
- Isman, A. T. (2025, January 4). *Hasil Wawancara dengan Staff Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat*.
- Jamalia. (2025, January 3). *Hasil Wawancara dengan Korban*.

- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peaturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Madjloes. 1980. *Pengantar Hukum Pidana Islam* (p. 35). Jakarta: CV. Amelia.
- Makarao, M. T., & Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (p. 26). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mendrofa, M. (2025, January 4). *Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat*.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana* (p. 1-3). Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka (p. 48).
- Satochid, K. (n.d.). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1*. Jakarta: Balai Lektur Maha Siswa.
- Shihab, M. Q. 2009. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. II, p. 596). Jakarta: Lentera Hati.
- Situmorang, J. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Fiqh Jinayyah)* (p. 20). Bandung.
- Situmorang, J. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Fiqh Jinayyah)* (p. 36). Bandung.
- Soeroso, R. A. (2025, January 2). *Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat*.
- Soesilo, R. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, D. 2024. *Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*. Muhammadiyah Law Review, 8(2).

TafsirWeb. (n.d.). *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 286*. Retrieved from <https://www.tafsirweb.com>.

Tahir, H. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (p. 32). Yogyakarta: Laksbang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1). (Surabaya: Apollo Lestari, 2019), p. 18.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Zakky. 2018. *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum* (Agustus 27, 2018).